

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah-daerah provinsi dan beberapa provinsi terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota (Mustika, 2014). Indonesia sangat heterogen, ada daerah yang kaya pajak, ada daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi ada juga daerah miskin yang tidak punya apa-apa (Sugianto, 2008). Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Purwanto, 2016).

Dengan pemberian otonomi kepada suatu daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk dapat mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab serta mampu meningkatkan daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, akan dengan mudah memenuhi kebutuhan daerahnya demi tercapai kesejahteraan masyarakat (Mubarok, 2016). Oleh karena itu, Kemandirian daerah dalam otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar dapat membangun daerahnya (Nggilu, Sabijono & Tirayoh, 2016).

Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa agar pemerintah daerah dapat melakukan manajemen pendapatan secara optimal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dengan didukung oleh faktor ketersediaan keuangan yang memadai, diantaranya pendapatan Asli Daerah (PAD) (Vamiagustin, dkk, 2014). Salah satu komponen utama desentralistik adalah *Desentralisasi Fiscal*, pembiayaan otonomi daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rooy & Budiarmo, 2015). Sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan (Rajali, 2010).

Menurut Rachim (2015), pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Soleh & Rochmansjah (2010), pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab (Fisanti, 2013).

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh

pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD (Maznawaty, dkk, 2015). Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik (Taras & Artini, 2017). Menurut Mahmudi (2010), retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, serta pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, hasil dari lain-lain usaha daerah yang sah ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan daerah pada bidang tertentu.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awalnya adalah bagian dari Provinsi Sumatera Selatan (Babelprov.go.id, 2017). Namun, berdasarkan UU No. 27 Th 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi sendiri bersama dengan Banten dan Gorontalo. Provinsi Kep. Bangka Belitung terdiri dari 6 Kabupaten, 1 Kota, 36 Kecamatan dan 326 Kelurahan. Dengan adanya pemekaran wilayah ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengatur sendiri daerahnya serta dapat menggali potensi daerahnya sendiri untuk dijadikan pendapatan daerah yang mendorong tingkat laju perekonomian Bangka Belitung sendiri. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Kompas.com (2017), sejak melepas diri dari Sumatera Selatan, Bumi Serumpun Sebalai yang menaungi 7 (tujuh)

kabupaten/kota memperlihatkan perkembangan signifikan. Menurut Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, perkembangan mencolok terlihat dari pendapatan asli daerah (PAD) yang naik hingga ratusan miliar rupiah (Kompas.com, 2017).

Berdasarkan informasi yang dilansir dari website resmi Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung (BAKEUDA, 2018), diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diubah menjadi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta 7 (tujuh) UPTB Kabupaten/kota. Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah provinsi. Tugas pokok BAKEUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas ekonsentrasi, dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah (BAKEUDA, 2018).

PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada table I.1 berikut:

**Tabel I.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2015-2017**

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
2015	558.971.218.953,54	571.802.889.855,14	102,30
2016	581.397.810.823,26	574.258.443.819,77	98,93
2017	738.192.092.935,16	709.832.181.818,48	96,16

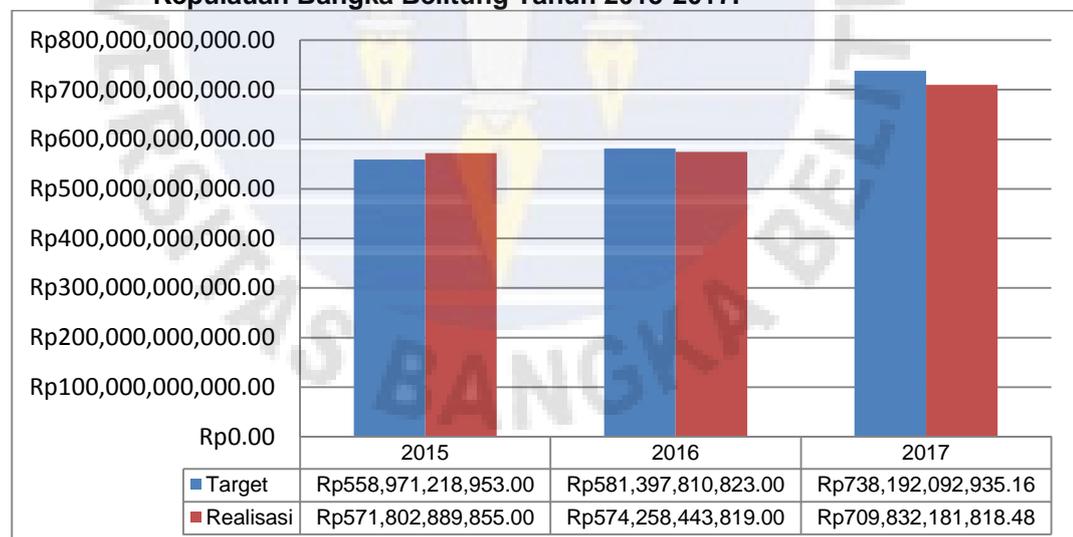
Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung, diolah peneliti (2018).

Berdasarkan tabel I.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa selama periode 3 tahun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung selalu mencapai target dan melebihi target yang ditetapkan pemerintah daerah. Pertumbuhan realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan atau kenaikan, tetapi pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 PAD tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan meskipun realisasinya mengalami kenaikan. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara kepada pihak BAKEUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satu hal yang dapat menyebabkan naik turunnya pertumbuhan PAD suatu daerah adalah target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu tinggi sehingga realisasinya sulit tercapai.

Agar lebih jelas dan mudah dipahami, realisasi dan target PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik I.1 Rekapitulasi Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2017.**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah peneliti (2018).

Sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara terhadap pihak BAKEUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kontribusi tertinggi sumber PAD adalah hasil pendapatan dari pajak daerah. Target dan Realisasi dari sumber PAD tersebut tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2 Rekapitulasi Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2015-2017.**

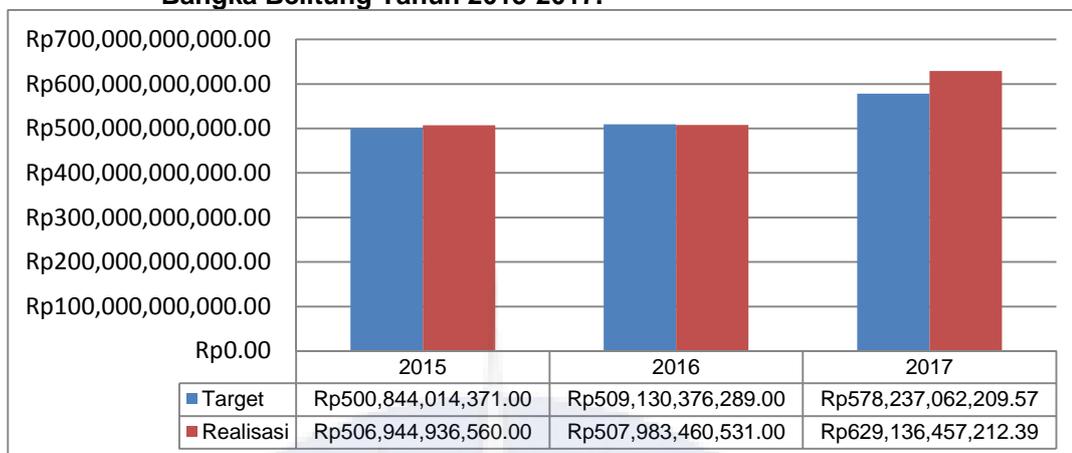
TAHUN	JENIS PAD	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2015	Pajak daerah	500.844.014.371,82	506.944.936.560,22
	Retribusi daerah	8.445.970.286,00	11.520.364.359,00
	Lain-lain PAD yang sah	42.181.234.295,72	48.094.172.699,14
2016	Pajak daerah	509.130.376.289,67	507.983.460.531,72
	Retribusi daerah	8.886.514.493,56	8.651.866.891,72
	Lain-lain PAD yang sah	57.767.577.457,26	52.009.773.813,56
2017	Pajak Daerah	578.237.062.209,57	629.136.457.212,39
	Retribusi Daerah	19.409.736.914,87	5.434.540.818,00
	Lain-lain PAD yang sah	132.045.293.810,72	69.954.766.361,04

Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung, diolah peneliti (2018).

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2017 realisasi selalu mencapai dan melebihi target, tetapi di tahun 2016 dan 2017 realisasi tidak mencapai target meskipun realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya.

Agar terlihat lebih jelas dan mudah dipahami pertumbuhan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

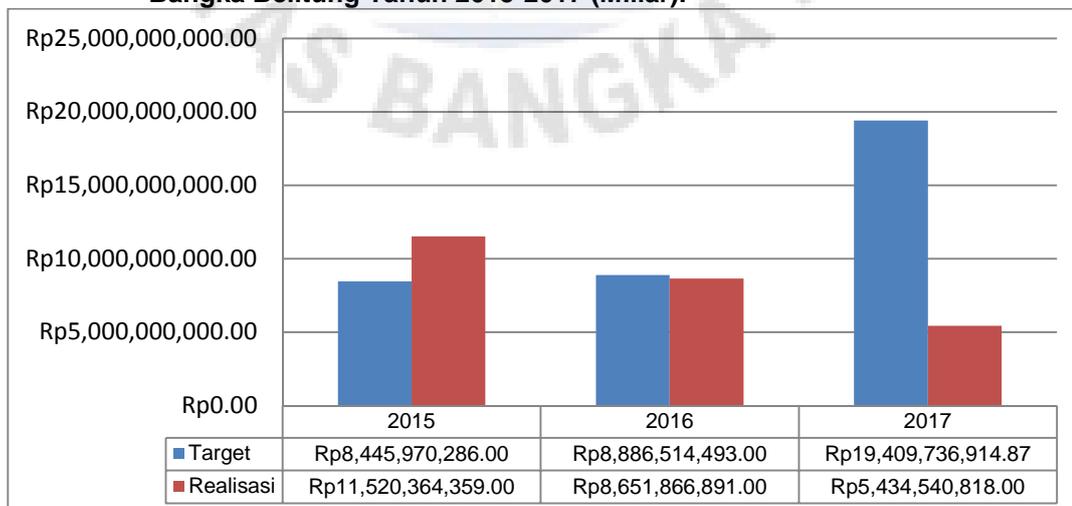
**Grafik I.2 Rekapitulasi Realisasi dan Target Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2017.**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah peneliti (2018).

Berdasarkan grafik I.2 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun dari tahun 2015-2016 realisasinya tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan pada tahun 2017 realisasinya meningkat. Meskipun demikian, realisasi pajak daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mencapai target, akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 realisasi pajak daerah tidak mencapai target.

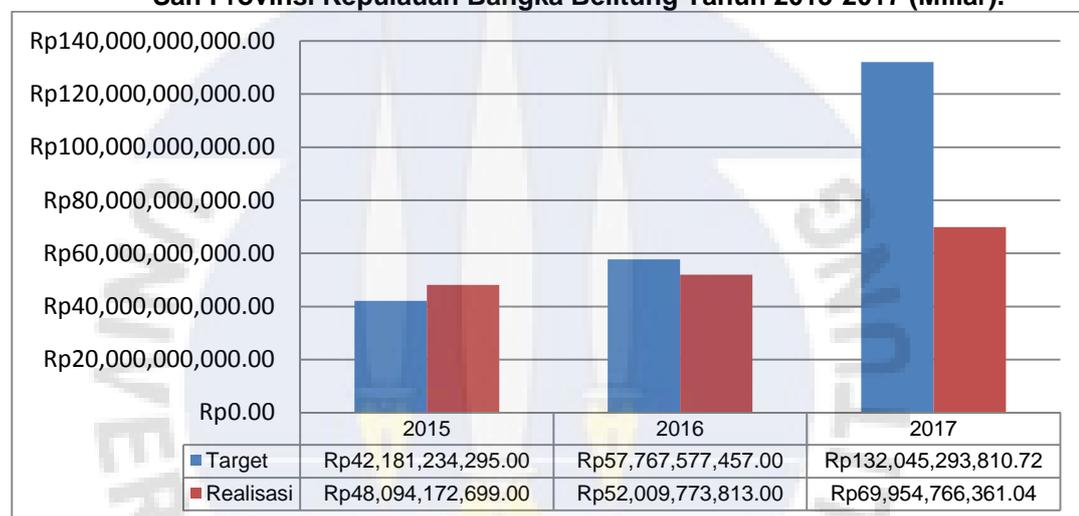
**Grafik I.3 Rekapitulasi Realisasi dan Target Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2017 (Miliar).**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah peneliti (2018)

Berdasarkan grafik I.3 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi retribusi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan realisasinya mencapai dan melebihi target. Akan tetapi, realisasi retribusi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak mencapai target.

**Grafik I.4 Rekapitulasi Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2017 (Miliar).**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah peneliti (2018)

Berdasarkan grafik I.4 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan realisasinya selalu mencapai dan melebihi target. Akan tetapi, realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016-2017 tidak mencapai target meskipun realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, peneliti menduga terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD

yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini juga dapat diperkuat dengan penelitian terdahulu mengenai PAD yang dilakukan oleh Asteria (2015) mengenai Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2014) mengenai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2017 yang peneliti tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun 2015-2017”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015-2017?

2. Apakah retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015-2017?
3. Apakah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015-2017?
4. Apakah pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015-2017?

### **1.3 Batasan Penelitian**

Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas dan terarah serta memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti melakukan pembatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2015-2017.
3. Penelitian ini hanya meneliti pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta dijadikan variabel yang akan diteliti oleh peneliti.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, penulis tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-2017.
2. Untuk menganalisis apakah retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-2017.
3. Untuk menganalisis apakah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-2017.
4. Untuk menganalisis apakah pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-2017.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan yang memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Ekonomi dan Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan kajian tentang keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD), dan sebagai bahan referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah/instansi terkait dalam menentukan dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasa yang akan datang.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran pembahasan secara singkat dari masing-masing bab yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap masalah. Penulisan ini dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II          LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang mendasari dalam analisis penelitian ini, seperti teori tentang

manajemen keuangan, manajemen keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. Pada bab ini juga mengemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolonieritas.), regresi linear berganda, uji determinasi, dan pengujian hipotesis (uji T dan uji F).

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pemaparan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis dan interpretasi data, dan pembahasan hasil.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan penjelasan tentang gambaran hasil analisis dan saran yang diberikan penulis sebagai bahan masukan pada perusahaan/instansi yang diteliti. Sedangkan kesimpulan dari hasil analisis sebagai pertimbangan manajemen perusahaan/instansi dan memperkaya

konsep serta teori bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

